

## **ABSTRAK**

### **PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMBUKAAN LAHAN KAVLINGAN DI LAHAN PERTANIAN DI KOTA METRO**

Oleh:  
TIARA FADILLAH  
NPM. 19810008

Perkembangan teknologi tumbuh sangat cepat. Hal ini ditunjukkan dengan banyak terciptanya aplikasi-aplikasi untuk menyampaikan informasi secara praktis dan cepat serta mudah untuk ditelaah sehingga berdampak baik dalam pembangunan suatu wilayah dan menganalisis sebaran lahan persawahan yang mengalami perubahan yang ada di Kota Metro. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: a. Bagaimanakah pelanggaran administrasi pembukaan lahan kavlingan di lahan pertanian di Kota Metro?. b. Bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian di Kota Metro?. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis Empiris, yaitu: melalui teknik wawancara dengan para Narasumber. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Pelanggaran administrasi pembukaan lahan kavlingan di lahan pertanian di Kota Metro sudah mencapai 6 ha atau 26,55% dari seluruh perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi pembukaan lahan kavlingan di wilayah Kota Metro, sehingga perlu adanya sanksi dan penegakan peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi pembukaan lahan kavlingan di wilayah Kota Metro oleh pemerintah secara tegas. 2. Penegakan hukum terkait alih fungsi lahan pertanian belum efektif karena banyaknya kendala baik menyangkut kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak alih fungsi lahan pertanian namun mereka terus menerus melakukan alih fungsi baik secara alami (berkembang dengan sendirinya) maupun yang dilakukan oleh pengembang. Saran: 1. Peran aktif Pemerintah Kota Metro dari Ketua RT, Ketua RW, dan kelurahan, kecamatan untuk mencegah dengan pengawasan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kota Metro. 2. Perlu dirancang desain tata ruang Kota Metro yang memungkinkan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di pinggir jalan dan di belakangnya dipertahankan untuk tanah pertanian.